

SKRIPSI

**PENERAPAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS
KEARIFAN LOKAL DALIHAN NA TOLU PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PADANGSIDIMPUAN**

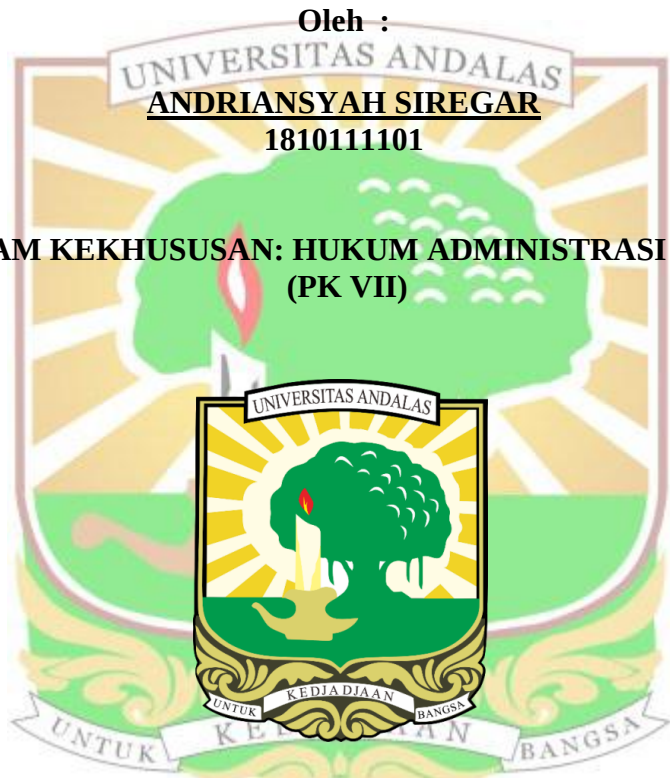
*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ANDRIANSYAH SIREGAR

1810111101

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
(PK VII)**



Pembimbing :

Guminarti, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 10/PK-VII/II/2025

PENERAPAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS

KEARIFAN LOKAL *DALIHAN NA TOLU* PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PADANGSIDIMPUAN

ABSTRAK

Pelayanan publik berbasis kearifan lokal di Indonesia sudah banyak digunakan di Indonesia, hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang diterapkan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan tersebut mengeluarkan Peraturan Walikota yaitu Penerapan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal *Dalihan na tolu*. *Dalihan na tolu* yang dipercayai masyarakat Kota Padangsidimpuan meliputi *mora*, *kahanggi* dan *anak boru*. Pelayanan publik merupakan masalah birokrasi yang terjadi di dalam pemerintah Indonesia saat ini khususnya Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan. Adapun permasalahan yang sering dijumpai dalam pelayanan publik pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan yaitu banyaknya stratifikasi sosial yang terjadi antara pegawai pemerintah dengan masyarakat, adanya pungli dan banyaknya pegawai yang korup. Berbagai kebijakan sudah dilakukan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Penyelenggara Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal *Dalihan na tolu* Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan? (2) Apa Kendala Penerapan Penyelenggara Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal *Dalihan na tolu* Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan mengambil sumber data lapangan dan melakukan wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan Penyelenggara Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal *Dalihan na tolu* Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan belum berjalan dengan baik karena masalah tersebut diatas belum bisa diatasi dengan baik dan prinsip *dalihan na tolu* yaitu *mora*, *kahanggi* dan *anak boru* belum terlaksana dengan baik. (2) Adapun kendala-kendala dalam Penerapan Penyelenggara Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal *Dalihan na tolu* Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang penerapan pelayanan publik berbasis kearifan lokal *dalihan na tolu* tersebut karena tidak meratanya sumber informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat serta pegawai yang kurang mengetahaui tentang *dalihan na tolu* tersebut, perkembangan modernisasi di Kota Padangsidimpuan yang menyebabkan pelayanan publik tersebut susah diterapkan dan faktor SDM Pegawai yang kurang mengerti tentang pelayanan publik berbasis kearifan lokal *dalihan na tolu*.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kearifan Lokal *Dalihan na tolu*, Penerapan *Dalihan na tolu*